

**PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN
UNTUK PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG DI KABUPATEN
BANTUL (Studi Kasus Pembangunan Perumahan
di Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta)**

Muhammad Rio Ervandra Putra¹, Any Andjarwati²

Intisari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pengawasan pembangunan perumahan di Desa Sabdodadi oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dan kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan pengawasan terhadap pembangunan perumahan di Desa Sabdodadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang bersifat deskriptif dengan mendasarkan pada data primer dan sekunder. Subjek penelitian adalah responden yang terlibat langsung dan narasumber yang memberikan pendapatnya. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan alat pengumpulan data dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil data yang bersifat khusus yang berkaitan dengan permasalahan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat dikemukakan dua kesimpulan pertama pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul yang diwujudkan dengan program pengawasan dengan program Audit Pemanfaatan Ruang. Program pengawasan mempunyai dua fokus pengawasan, yaitu pengawasan pembangunan perumahan berizin yaitu pengawasan pelaksanaan izin yang diberikan kepada pengembang dan pembangunan perumahan tidak berizin yaitu pembangunan perumahan yang diduga tidak berizin. Pelaksanaan pengawasan pembangunan berizin dilaksanakan pemeriksaan pada permulaan pekerjaan dan selama pekerjaan dilakukan. Pengawasan pembangunan tidak berizin dilaksanakan dengan melakukan patroli setiap minggunya, namun pelaksanaan pengawasan tersebut masih belum maksimal. Kendala dalam pengawasan pembangunan perumahan Di Kabupaten Bantul antara lain : Perubahan kepengurusan dalam struktur organisasi perangkat daerah, Terbatasnya Aparatur Pelaksana, dan Tidak di anggarkannya dana operasional.

Kata kunci: pengawasan pembangunan perumahan

¹Daerah Istimewa Yogyakarta, kec. Depok, kab. Sleman, Email : rioervandra94@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

**IMPLEMENTATION OF HOUSING DEVELOPMENT CONTROL FOR
SPACE UTILIZATION CONTROL IN BANTUL DISTRICT
(Case Study of Housing Development
in Sabdodadi Village, Bantul Regency,
Special Region of Yogyakarta)**

Muhammad Rio Ervandra Putra¹, Any Andjarwati²

ABSTRACT

The purpose of this research is to find out and analyze the implementation of supervision of housing construction in Sabdodadi Village by the Government of Bantul Regency, Yogyakarta Special Region and the constraints experienced by the Government of Bantul Regency in carrying out supervision of housing construction in Sabdodadi Village, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta.

This research uses descriptive empirical juridical research based on primary and secondary data. The research subjects used respondents who were directly involved and Narasumber who gave their opinions. Data collection techniques with interviews and data collection tools based on the list of questions that have been prepared. This research data analysis uses qualitative methods by taking data that is specifically related to the problem in order to obtain answers to the problems studied.

Based on the results of research and discussion, it can be stated that the first two conclusions of the implementation of supervision carried out by Bantul Regency Land and Spatial Planning Office are realized with the supervision program with the Audit of Space Utilization program. The supervision program has two focuses of supervision, namely supervision of the construction of licensed housing, namely supervision of the implementation of permits granted to developers and construction of unlicensed housing, namely the construction of allegedly unlicensed housing. Supervision of construction permits carried out inspection at the beginning of the work and during the work carried out. Supervision of unlicensed development is carried out by conducting patrols every week, but the implementation of the supervision is still not optimal. Obstacles in the supervision of housing development in Bantul Regency include: Management changes in the organizational structure of the regional apparatus, Limited Implementing Apparatus, and operational budgeting.

Key words: supervision of housing development

¹Daerah Istimewa Yogyakarta, kec. Depok, kab. Sleman, Email : rioervandra94@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta